



PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN



HARUN BLONGKOD

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Harun Blongkod



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penulis:
Harun Blongkod

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
v, 110, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-122-2

Cetakan Pertama:
Agustus 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dipanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wataala karena atas izin, rachmat dan ridhaNya sehingga buku dengan judul “Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern” dapat terselesaikan.

Tingkat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami fluktuatif setiap tahunnya, hal ini menuntut pemerintah daerah lebih menerapkan pengelolaan, pengawasan serta informasi yang akurat berkaitan dengan penurunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Terjadinya penurunan prosentasi pendapatan, diperlukan perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan perbaikan tata kelola keuangan dan pola periodik untuk mencapai target pembangunan serta mewujudkan pertumbuhan pendapatan.

Buku "Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern" hadir sebagai sebuah upaya untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para profesional, akademisi, dan pembaca yang tertarik dalam bidang ini.

Akhir kata, penulis berharap buku ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Konsep <i>New Public Management</i> (NPM).....	14
Bab 3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
A. Definisi Kinerja.....	18
B. Indikator Kinerja.....	19
Bab 4 Pengelolaan Keuangan Daerah	30
A. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah	30
B. Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah.....	37
C. Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)	39
Bab 5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	41
A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	41
B. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	42
C. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern.....	43
D. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	46
E. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	47
F. Enam Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .	48
Bab 6 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).....	58
A. Definisi Sistem Informasi Manajemen	58
B. Manfaat Sistem Informasi Manajemen	59
C. Dimensi Sistem Informasi Manajemen.....	59
D. Komponen – Komponen Sistem Informasi Manajemen.....	60
E. Definisi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	61
F. Klasifikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.....	62
G. Unsur Sistem Informasi Manajemen Daerah	63
H. Karakteristik dan Manfaat Sistem Informasi Manajemen Daerah	64
Bab 7 Gambaran Umum OPD	72
Bab 8 Pengelolaan Keuangan Daerah	75
Daftar Pustaka	97
Profil Penulis.....	110

BAB 1

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang disebutkan dalam pasal 3 keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan karena semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya diperkuat lagi dalam pasal 6 ayat 2 poin c menyebutkan semua tanggungjawab diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu pemerintah

daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sistem evaluasi, monitoring, dan pengukuran kinerja yang sistematis guna mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu juga perlu diterapkan.

Pengukuran kinerja diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019) pasal 1 ayat 32 menyebutkan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor. Satu diantaranya adalah karakteristik daerah. Sebagaimana hasil analisis dari Sumarjo, (2010) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara simultan dipengaruhi oleh karakteristik pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai pendapat Halim, (2007:228) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Mahmudi, (2010:181) bahwa untuk melaksanakan pembangunan prasarana, pemerintah daerah dapat membiayai dari sumber pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Karena kecilnya pendapatan asli daerah dibanding dengan kebutuhan pembangunan maka dalam beberapa hal pemerintah daerah memerlukan pinjaman untuk digunakan pada proyek- proyek yang dapat menghasilkan pendapatan. Sunardi, (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan target penerimaan pendapatan asli daerah untuk mendorong tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui bantuan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus membutuhkan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa diminimalisasi dengan baik. Oleh karena itu kinerja keuangan yang menjadi poin penting dalam menganalisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah penting untuk dilakukan.

Faktor-faktor yang menunjang kegiatan peningkatan kinerja keuangan adalah dengan memperbaiki pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi manajemen daerah membutuhkan cakupan kegiatan yang mendasar agar capaian target bisa tercapai dengan baik.

Peningkatan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan perencanaan dan pengendalian, hal ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Hariadi (2014:7) yang dirujuk Rondonuwu et al.,

(2015) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memiliki beberapa fungsi utama yaitu alat perencanaan alat pengendalian alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, serta alat menciptakan ruang publik. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Kurrohman, (2013) mengatakan bahwa perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif dan efisien. Sejalan dengan analisis Bulan et al., (2017) bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Armando, (2013) bahwa pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan.

Sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP), sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang percepatan

peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan Negara, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 tentang peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, badan pengawasan keuangan dan pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.

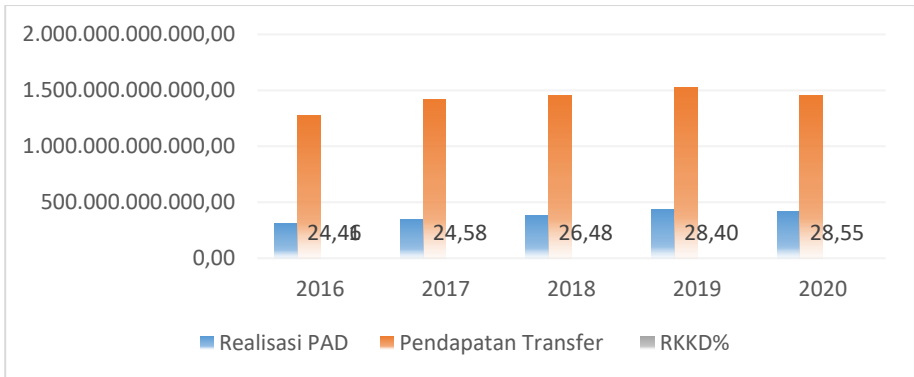
Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang andal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah/korporasi (KLPK) bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah diperlukan suatu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Untuk mengoptimalisasi manajemen daerah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang dirujuk oleh Josvidar, (2017) bahwa tujuan dari

pengembangan program aplikasi SIMDA adalah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu serta meningkatkan ketepatan terhadap pertanggungjawaban berkaitan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Syawie et al., (2017) mengatakan bahwa penggunaan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) sebagai alat pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan mempermudah pengelola keuangan yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang lebih akurat, SIMDA di lengkapi dengan pembatasan pengeluaran, apabila sudah melebihi jumlah anggaran yang tersedia maka sistem akan menolak pengeluaran tersebut. Implementasi sistem informasi manajemen daerah diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pemerintahan.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat berkaitan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah serta untuk mengetahui perkembangan pembangunan utamanya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan realisasi pendapatan diperlukan analisis kinerja keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran.



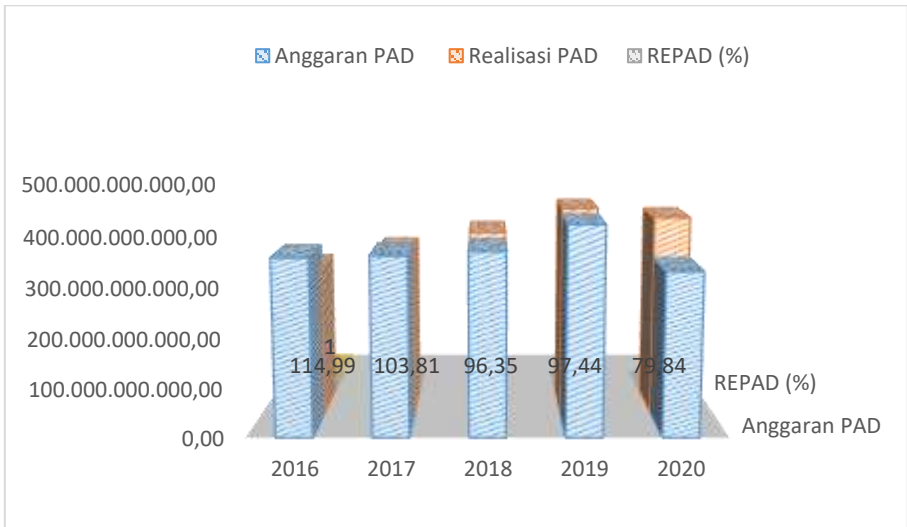
Gambar 1.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (KKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007).

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas perhitungan kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak lain semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Pada tahun 2016 kemandirian keuangan daerah sebesar 24,46% dan tahun 2017 sebesar 24,58% (pola hubungan intruktif) artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada peranan pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan sebesar 26,48%, 28,40% dan 28,55% dengan pola hubungan konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah

dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Pola hubungan kemandirian keuangan daerah masih tergolong pola hubungan instruktif dan konsultatif karena masih tergolong dalam interval 0-25% dan 25-50% besaran alokasi pembiayaan daerah.

Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).

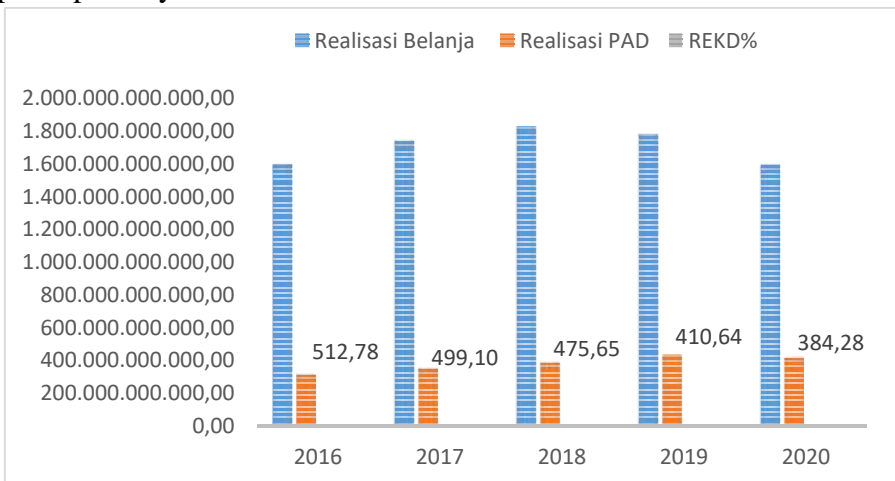


Gambar 1.2 Efektivitas Penerimaan PAD

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas perhitungan efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah pada tahun 2016 sebesar 114,99%, dan tahun 2017 sebesar 103,81% prosentase diperoleh melebihi 100% ($x > 100\%$), sehingga dikategorikan efektif dalam merealisasikan penerimaan pendapatan daerah. Kemudian di tahun 2018 sebesar 96,35% dan tahun 2019 sebesar 97,44% serta tahun 2020 sebesar 79,84%, prosentase di tiga tahun terakhir dibawah 100% ($x < 100\%$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak efektif atau penerimaan pendapatan asli daerah tidak mencapai target untuk tahun 2018-2020. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah menurun dari yang

dianggarkan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan memiliki kinerja yang masih relatif dibawah dalam hal merealisasikan pendapatan daerah yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan dan merealisasikan target penerimaan perlu mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah serta melakukan efisiensi keuangan dalam hal besarnya biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan.

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila angka yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga akan diketahui kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

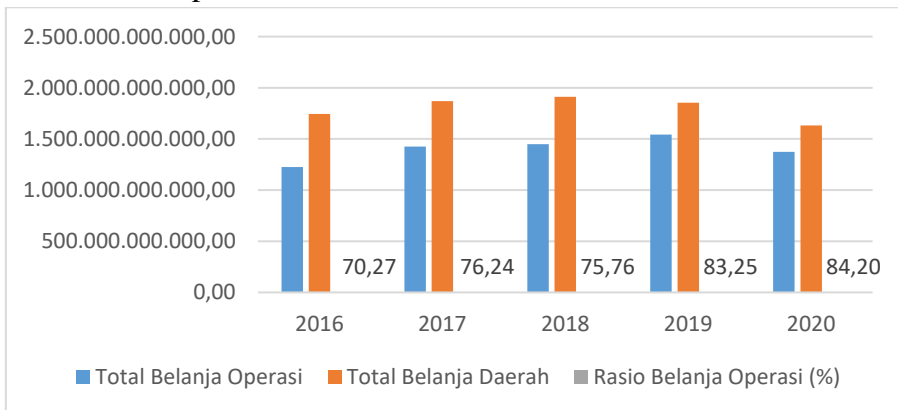


Gambar 1.3. Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas perhitungan efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan asli daerah dan realisasi

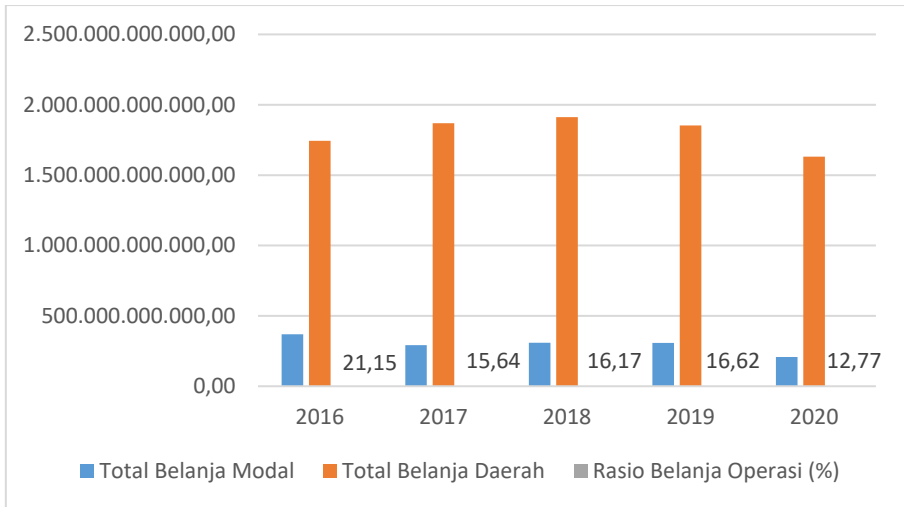
belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020, terlihat dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan masih di atas > 100%, sehingga dapat dikatakan belum efisien atau kurang baik, karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk meningkatkan efisiensi diharapkan pemerintah daerah dapat meminimalisir jumlah belanja operasi dan belanja modal dengan disesuaikan dengan pendapatannya.

Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.



Gambar 1.4 Keserasian (Belanja Operasi)

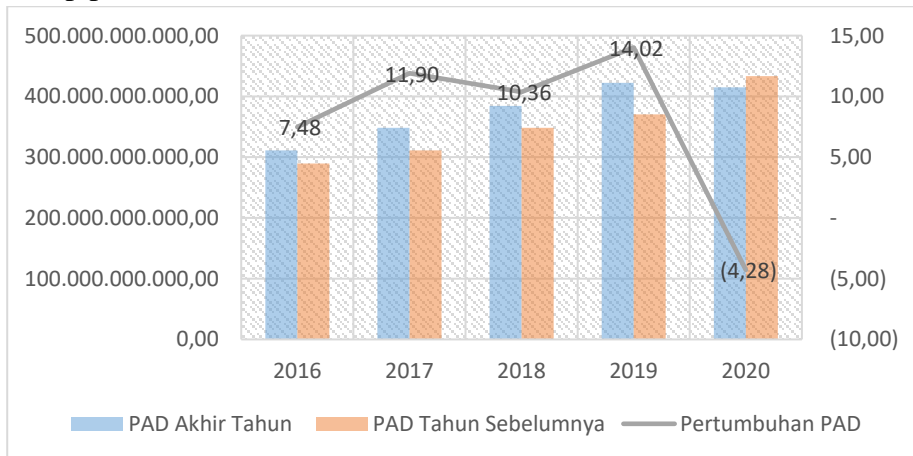
Berdasarkan Gambar 1.4 di atas perhitungan belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Perkembangan belanja operasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Sehingga proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yakni antara 70% – 85%. Dari proposi belanja operasi tersebut menunjukkan pemerintah memiliki pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi lebih tinggi berbeda dengan pemerintah daerah yang memiliki pendapatannya rendah.



Gambar 1.5 Keserasian (Belanja Modal)

Belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan Gambar 1.5 di atas perhitungan belanja modal dari tahun 2016-2020 diketahui besaran penggunaan belanja modal dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Uraian dan perhitungan di atas menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal relatif kecil. Belanja operasi masih sangat besar dibandingkan belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, pemerintah daerah lebih banyak pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal belum memadai. Agar terpenuhinya belanja modal diperlukan pertumbuhan pendapatan daerah yang bisa memberikan dampak terhadap peningkatan kemajuan daerah.

Pertumbuhan pendapatan (*revenue growth*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi prosentasi pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.



Gambar 1.6 Pertumbuhan PAD

Berdasarkan Gambar 1.6 di atas bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah mengalami pertumbuhan positif artinya daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari periode satu keperiode berikutnya. Namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,28% artinya daerah belum mampu mempertahankan pendapatan dari aspek pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bila dibandingkan dari pendapatan tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah di atas menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah (PAD) mengalami fluktuatif setiap tahunnya, hal ini menuntut pemerintah daerah lebih menerapkan pengelolaan, pengawasan serta informasi yang akurat berkaitan dengan penurunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Terjadinya penurunan prosentasi pendapatan, diperlukan perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan perbaikan tata kelola keuangan dan pola periodik untuk mencapai target pembangunan serta mewujudkan pertumbuhan pendapatan. Hal ini untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan sejalan dengan target pemerintah daerah untuk memperbaiki tingkat ketimpangan sosial, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia (IPM).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, M. H., & Muturi, W. (2016). *Effect Of Internal Control Systems On Financial Performance Of Higher Education Institutions In Puntland. International Journal of Economics, Commerce and Management, United Kingdom, IV(12), 762–780.* <https://doi.org/10.7176/rjfa/10-20-02>
- Agustina, N., & Saifanur, A. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 5(1), 86–98.* [https://doi.org/10.32400/ja.16034.6.1.2017.118-127.](https://doi.org/10.32400/ja.16034.6.1.2017.118-127)
- Alfian, M. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Analisis pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo). *3rd Economics & Business Research Festifval, 13 November, 1698–1712.*
- Alfian, M. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Simda dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret, 16(1), 1–11.*
- Anindita, T. A. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012. *Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau, 66(3), 1–15.*
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Analisis: Suatu Pendekatan Praktik.* PT Rineka Cipta.
- Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Analisis Teknologi Dan Lingkungan (JRKTL)*, 2 (September 2015), 15–23.
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). *Jurnal Universitas Negeri Padang*, 1–25.
- Arsanti, T. A. (2009). Hubungan antara penetapan tujuan, Self-Efficacy dan Kinerja. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(2), 97–110.
- Atreya, B., & Armstrong, A. (2002). A Review of the Criticisms and the Future of New Public Management. *Review Working Paper Series*, 85(6), 1–17. <https://doi.org/10.20955/r.85.67>
- Aziz, N. J. A., Pratiwi, U., & Suyono, E. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. *Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(04), 1–12.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Bett, J. C., & Memba, F. S. (2017). *Effects of Internal Control on the Financial Performance of Processing Firms in Kenya: A Case of Menengai Company*. *International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCM)*, 4(1), 105–115.
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017a). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263–271. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Analisis Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit Airlangga University Press.

- Chabib, R. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Chintya, I. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok (Studi pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 1–14.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control–Integrated Framework*. New York: AIGPA’s Publication Division.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indriyani (ed.); Pertama). PT Indeks.
- Deddy, N., & Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Dewi, A. K. (2014). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).
- Dewi, N. M. R. K., Sinarwati, N. K., & Darmawan, N. A. S. (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 2(1), 1–12.
- Dewi, N. W. L., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 63–69.
- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal*

Akuntansi Aktual, 3(4), 311–327.

- Edwards, L. M. (2011). *Strategic Planning in Local Government: Is the Promise of Performance a Reality? A Dissertation Presented to The Academic Faculty*, 153.
http://scholarworks.gsu.edu/pmap_diss/36
- Ejoh, N., & Ejom, P. (2014). *The effect of internal controls on the financial performance of tertiary institutions in Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online)*, 5(10), 133–144.
- Fannur, E. (2015). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Skripsi, STIE Lhokseumawe.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33–48.
<http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Fitriyanti, R., Azlina, N., & Kurnia, P. (2015). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Empiris SKPD Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34061.
- Ghozali, I. (2016). Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gowinda, G. K. (2010). Analisis perilaku penerimaan wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing (analisis empiris di wilayah Kota Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hanum, S., Zulfiar, E., & Agustina, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Dinas dan Badan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3 (November), 86–96.
- Hardini, R. (2019). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat).
- Hariyono, S. (2016). Metode SEM Untuk Analisis Manajemen AMOS LiSREL PLS. In PT IPU.
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Rineka Cipta.
- Harun. (2009). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). *JSTAR – Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1.64>
- Hery. (2014). *Pengendalian akuntansi dan manajemen*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta
- Hertanto, Y., Domai, T., & Amin, F. (2016). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(2), 15–24.
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons? Public*

Administration, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Indriasari, D. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumberdayamania, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium nasional Akuntansi (SNA) *Ke XI*, 53(9), 1–63.
- Irham, F. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Alfabeta. CV.
- Iskandar, J., Ratnawati, V., & Darlis, E. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2, 1–15.
- Istiyani. (2009). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Jayanti, E. K. A., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. (2012). Pengaruh Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun). In Pendidikan Akuntansi FKIP.
- Josvidar, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan (Survey Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sigi). *E Jurnal Katalogis*, 5(2), 92–103. <https://doi.org/2302-2019>
- Kartika, H. R., & Amalia, D. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Pada Pemerintah. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.12928/j.reksa.v3i1.25>
- Kurrohman, T. k. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja

- Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value for Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294>.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Unnes Accounting Analysis Journal*.
- Liow, M. S. ., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kota-Kota Yang Ada Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 1–12. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.23450.20.01.2019>
- Livari, J. (2005). *An Empirical Test of The DeLone –McLean Model of Information System Success Database for Advance in Information System (DFA)*. Proquest Company, 1532–0936.
- Machmud, R. (2018). *Kepuasan Penggunaan Sistem Informasi (Studi Kasus pada T3-Online)*. Ideas Publishing.
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(2302–8556), 230–244.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Manaroinsong, J. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan, Partisipasi Anggaran serta Sikap Perilaku Aparat terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 12(3), 373–384.

<https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/683>

- Mardiasmo. (2001). Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Journal & Proceeding Universitas Sebelas Maret*, 3(1), 1–16.
- Marjoni, Amir, A. M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan (SKPD) Kabupaten Sigi. *E Jurnal Katalogis*, 6(2302–2019), 63–74.
- Masdiantin, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, Intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK Pada Kinerja Keuangan. pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
- Mawanda, S. P. (2018). *Effects of Internal Control System on Financial Performance in an Institution of Higher Learning In Uganda. Journal of Fundamental and Applied Sciences*, 10 (3S), 1–81. <https://doi.org/10.4314>.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Analisis Kualitatif. PT.Remaja.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://doi.org/2597-7601>
- Onaolapo, A. A., & Odetayo, T. A. (2013). *Effect of Accounting Information System on Organisational Effectiveness: A Case Study of Selected Construction Companies in Ibadan, Nigeria. American Journal of Business and Management*, 2(1), 183.

<https://doi.org/10.11634/216796061706210>

- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Jdih Bpk Ri 1 (2014).
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 11 tahun 2016. Tentang Kelembagaan Pemerintah Provinsi Gorontalo, (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
- Pranomo, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7, 83–112. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama>.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016a). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
- Putri, G. Y. (2013). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Robetson. (2002). *Loka Karya Review Kinerja. BPKP dan Executive Education*.
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 3(2), 23–32.
- Rukhmiati, N. M. S., & Budiarta, I. K. (2016). Informasi Dan Perceived Usefulness Pada Kepuasan Pengguna Akhir Software

- Akuntansi (Studi empiris pada hotel berbintang di Provinsi Bali). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 115–142.
- Sahri, H. R., Agusti, R., & A, A. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *JOM FEKON*, 3(1), 89–103.
- Sari, D. B. M., Wiyanti, A., & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Nasional IENACO, 795–801. <https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1703>
- Sayidah, N., Mulyaningtyas, A., & Winedar, M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12(1), 39–52. <https://doi.org/10.14710/jaa.v12i1>.
- Sedarmayanti. (2012). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Mandar Maj).
- Seddon, P. B., & Kiew, M.-Y. (1995). *A Partial Test And Development Of Delone And Mclean's Model Of Is Success. Australasian Journal of Information Systems*, 4(1), 90–109. <https://doi.org/10.3127/AJIS.V24I0.2769>
- Sekaran, U. (2003). *Metodologi Analisis Kualitatif* (BPE (ed.)).
- Simatupang, M. S., Vince, & Susilatri. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan). *JOM Fekon*, 4(2), 411–425.
- SPA, D., & Harimurti, F. (2017). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). *EKSPLORASI*, XXIX(2), 166–176.

- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.*, 12(01)
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis.*, 12(01), 11–24., 11–24.
- Sudjana, N. (2014). *Metode Analisis*. Rineka, Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Analisis*. Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Analisis & Pengembangan (Resarch and Development)* (S. Y. Suryandari (ed.)). Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia). Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Sunardi. (2016). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua, Pengawasan Intern, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 7(02), 8–15.
- Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit MedPress.
- Supriadi, I. B. P. E., Herawati, N. T., & Adiputra, I. M. P. (2014). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behaviour Dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1*, 2(1).

- Suranto, A. (2007). *Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran*. UNY.
- Susantih, H., & Saftiana, Y. (2007). *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Syawie, H. A., Nangoi, G. B., & Kalangi, L. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Efektivitas Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Universitas Sam Ratulangi.
- Team Redaksi Nuansa Aulia. (2005). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Tresnawati, R. (2012). *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Prosiding Seminar Nasional, 139–151. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui>.
- Tuanakotta, T. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.
- Tuasikal, A. (2015). *Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Analisis dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku dengan)*. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 78–91.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*, (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*, 2014 (2014).
- Wagey, M. E. J., Nurdin, D., . S., & . K. (2020). *Analysis of Regional Financial Management and Regional Financial System in Central Sulawesi, Indonesia*. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 05(04), 269–273.

<https://doi.org/10.36348/sjbms.2020.v05i04.004>

- Wahyuni, T. (2011). Uji Empiris Model Delone dan Mclean Terhadap Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Jurnal BPPK*, 2.
- Wakiriba, J. W., Ngahu, M. S., & Wagoki, M. J. (2014). *Effects Of Financial Controls On Financial Management In Kenya's Public Sector: A Case Of National Government Departments In Mirangine Sub-County, Nyandarua County. IOSR Journal of Business and Management*, 16(10), 105–115. <https://doi.org/10.9790/487x-16103105115>
- Yaswat, L., Taufik, T., & Savitri, E. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupat. JOMFekom,

PROFIL PENULIS



Harun Blongkod, dilahirkan di Kayuogu 23 Desember 1973, Penulis telah menyelesaikan Diploma (D3) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negera (STAN), Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Gorontalo tahun 1998, Program Magister (S2) di Universitas Brawijaya, Malang Tahun 2011 dan Program Doktor (S3) di Universitas Tadulako, Palu tahun 2021. Penulis sebagai dosen tetap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Penulis Mengampu beberapa mata kuliah di Jurusan Akuntansi, Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo yakni mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Audit Sektor Publik, Perpajakan, Pengantar akuntansi, Aplikasi Komputer Statistika, Statistika Sosial, Sosiologi Ekonomi. Sebagai dosen, telah menghasilkan beberapa buku baik yang berupa buku ajar maupun buku yang ber-ISBN di bidang keuangan dan ekonomi.

Penemuan empiris yang berkaitan dengan hubungan langsung antara pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi manajemen daerah terhadap kinerja keuangan memberikan hasil yang positif dan signifikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Gorontalo membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi manajemen daerah akan mendorong kinerja keuangan daerah yang lebih baik dan selanjutnya akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengedepankan lima prinsip utama yaitu kemandirian keuangan daerah, efektifitas, efisiensi, pertumbuhan pendapatan serta keserasian dengan didasari transparansi dan akuntabilitas.

Penemuan empiris berkaitan dengan hubungan tidak langsung dan pengaruh langsung antara pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan adalah pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Oleh karena pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen daerah merupakan mediasi yang baik pada pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Gorontalo membuktikan bahwa sistem informasi manajemen daerah yang terdiri dari kepuasan pengguna (*Satisfaction Use*) adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman dalam menggunakan sistem informasi.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISSN 978-623-147-122-2



9 786231 471222